

Peatlands and the Climate: This year's COP29 must build on COP28

Lahan Gambut dan Iklim: COP29 tahun ini harus melanjutkan upaya yang telah dimulai pada COP28

Helena Varkkey, Michelle Miller, Matthew Ashfold

Dipublikasikan pada 7 Agustus 2024

Ekosistem lahan gambut yang kaya akan karbon memiliki potensi besar untuk memitigasi perubahan iklim serta membantu memenuhi target iklim nasional di Asia Tenggara. Peningkatan prioritas dan tindakan terkait lahan gambut harus dilanjutkan dari COP28 hingga COP29 pada bulan November mendatang.

Laporan [Global Stocktake Synthesis](#) pertama, yang diterbitkan dalam rangka Pertemuan ke-28 Konferensi Para Pihak (COP28) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Dubai tahun lalu, mengidentifikasi restorasi dan perlindungan ekosistem alam sebagai strategi penting yang dapat mendukung penyerapan CO₂ dalam skala besar untuk mitigasi perubahan iklim. Ekosistem gambut alami di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk memitigasi perubahan iklim dan membantu mencapai target iklim nasional di negara-negara Asia Tenggara.

Lahan gambut adalah hutan dan tanah yang tergenang air, di mana bahan yang kaya akan karbon dari biomassa di atas tanah dan akar mengendap di bawah air, lalu terurai sangat lambat. Melalui proses yang berlangsung selama ribuan tahun, karbon yang terakumulasi di dalam tanah berperan sebagai “penyerap” penting, yang didefinisikan sebagai sesuatu yang menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer daripada yang dilepaskannya. Laporan Penilaian Lahan Gambut Global dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebutkan bahwa lahan gambut hanya mencakup 3–4 persen dari luas daratan planet ini, namun mengandung hingga sepertiga (450–650 gigaton) dari total karbon tanah dunia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 6–10 persen berada di Asia Tenggara. [Para ahli](#) memperkirakan bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki cadangan karbon gambut sebesar 57,4 gigaton dan 9,1 gigaton. Sayangnya, lahan gambut di Asia Tenggara terancam oleh deforestasi, pengeringan, serta konversi menjadi lahan pertanian dan penggunaan lahan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini mempercepat proses dekomposisi di lahan gambut, sehingga melepaskan karbon ke atmosfer dan mengurangi kapasitas alami lahan gambut dalam menyerap serta menyimpan karbon.

Sejalan dengan pentingnya lahan gambut di tingkat global, topik ini menjadi sorotan utama pada COP28. Hal ini berbeda dengan pertemuan COP sebelumnya, di mana pembahasan mengenai lahan gambut sebagian besar [terbatas pada komunitas praktisi spesialis](#).

COP28 menyelenggarakan sejumlah acara sampingan yang berfokus pada lahan gambut, menyoroti [praktik terbaik di bidang](#) tersebut serta potensi lahan gambut sebagai [“Solusi Berbasis Alam yang Luar Biasa”](#). Lahan gambut juga menonjol di paviliun negara-negara seperti Indonesia dan Republik Demokratik Kongo (DRC). [Paviliun Lahan Gambut Virtual](#), yang dikembangkan bersama oleh Program

Lahan Gambut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* Inggris dan Universitas East London, menawarkan pengalaman 3D bagi pengunjung untuk mempelajari lahan gambut dan terinspirasi untuk bertindak.

Lahan gambut juga menjadi sorotan dalam Acara [Tingkat Tinggi](#) yang diselenggarakan oleh [Presidensi COP28](#), yang mengakui upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh [Global Peatland Initiative \(GPI\)](#). Melibatkan 55 pemangku kepentingan nonpemerintah, GPI bekerja sama dalam perlindungan dan konservasi lahan gambut di 4 negara tropis: Indonesia, Peru, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo. Dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat yang tinggal di dalam dan di sekitar lahan gambut serta LSM yang berperan penting dalam pemantauan dan pelaksanaan proyek, sangat penting untuk memulihkan dan melindungi lahan gambut.

Menjelang COP29, pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara sebaiknya tetap memasukkan lahan gambut ke dalam agenda iklim mereka dengan menyelaraskan tujuan nasional dan global terkait lahan gambut, sekaligus terus meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum di lapangan.

Pembahasan dalam COP28 menyoroti beberapa strategi yang saling terkait untuk memungkinkan lahan gambut berperan lebih efektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ke depan.

Pertama, negara-negara harus menyadari pentingnya menyelaraskan tujuan nasional dengan tujuan global. Kurang dari [15 persen](#) negara yang memiliki lahan gambut memasukkan target atau tindakan terkait lahan gambut dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) untuk Perjanjian Paris 2015 tentang Perubahan Iklim. Salah satu pengecualian yang menonjol adalah Indonesia, yang memasukkan lahan gambut ke dalam [NDC yang Diperkuat](#) dan [Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim](#) (LTS-LCCR) 2050. Indonesia telah memasukkan lahan gambut sebagai kategori lahan tersendiri dan telah menerbitkan rencana operasional terperinci untuk mencapai penyerapan bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 melalui pengelolaan lahan gambut skala besar.

Meskipun mitigasi terkait gambut kurang menonjol dalam rencana iklim Malaysia saat ini dibandingkan dengan Indonesia, [NDC terbarunya](#) memang mengidentifikasi lahan gambut sebagai bidang prioritas untuk meningkatkan adaptasi di sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati dengan menyisihkan kawasan penyangga yang lebih luas di sekitar rawa gambut. Penyelarasan kebijakan lahan gambut nasional dengan komitmen iklim global ini akan mendorong pelaporan emisi gambut yang lebih menonjol dan transparan di Malaysia maupun Indonesia, yang menjanjikan menjadi model yang dapat ditiru atau dijadikan teladan bagi negara-negara lain yang kaya akan lahan gambut.

Kedua, terdapat kebutuhan mendesak akan data faktor emisi lahan gambut yang lebih berkualitas dan lebih transparan. Faktor emisi adalah koefisien yang menggambarkan laju pelepasan gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer akibat suatu aktivitas tertentu. Pedoman Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mencakup faktor emisi *default* yang disusun melalui sintesis informasi yang telah dipublikasikan, yang dapat digunakan negara-negara untuk memperkirakan emisi dari lahan gambut. Namun, kualitas data emisi dapat ditingkatkan dengan menggunakan faktor emisi khusus negara dan perkiraan emisi khusus lokasi. [Laporan Pembaruan Dua Tahunan ke-4 \(BUR4\)](#) Malaysia

secara menjanjikan mengalokasikan dana internasional untuk meninjau faktor emisi lahan gambut, termasuk faktor emisi khusus untuk perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Data berkualitas tinggi semacam itu akan memungkinkan perhitungan emisi yang lebih akurat, sehingga mendukung pemantauan yang lebih akurat terhadap target emisi global.

Terakhir, diperlukan pendanaan yang lebih besar untuk mendukung restorasi dan perlindungan lahan gambut. Pendanaan iklim sering kali disalurkan melalui kemitraan publik-swasta seperti [REDD+](#) (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan+), sebuah kerangka kerja sukarela untuk mitigasi perubahan iklim di bawah UNFCCC di mana negara-negara berkembang dapat menerima pembayaran berbasis hasil atas pengurangan emisi yang terkait dengan lahan, serta keterlibatan kawasan lahan gambut nasional dalam menghasilkan kredit karbon.

[Penelitian](#) menunjukkan bahwa mitigasi karbon di lahan gambut dapat relatif hemat biaya, dengan biaya di bawah US\$100 per ton setara CO₂. Namun, kurangnya data yang kuat, termasuk data terkait emisi, membuat investor sulit meyakinkan bahwa proyek-proyek di lahan gambut layak didanai. [Verra](#), sebuah organisasi utama yang menetapkan standar kredit karbon, kini sedang mengembangkan metodologi khusus untuk proyek konservasi dan restorasi lahan gambut tropis. [Kerangka Kerja Investasi ASEAN untuk Pengelolaan Lahan Berkelanjutan Bebas Kabut Asap](#) juga bertujuan menggali dana hingga US\$1,5 miliar guna memperluas pembiayaan karbon lahan gambut di seluruh kawasan.

Azerbaijan, yang memiliki cadangan karbon gambut sekitar [3 megaton](#), akan menjadi tuan rumah COP29 pada November mendatang dan membuka jalan bagi “gerakan gambut” yang kuat, yang kini menjadi istilah [populer di kalangan para ilmuwan gambut](#). Para ilmuwan ini telah [merekomendasikan](#) pembaruan [Suplemen 2013](#) terhadap Pedoman IPCC 2006 untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Lahan Basah) guna memasukkan perkembangan ilmiah dan kebijakan terkini, serta membentuk satuan tugas untuk merumuskan “target lahan gambut” yang mencakup aspek air dan daratan.

Menjelang COP29, pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara sebaiknya tetap memasukkan lahan gambut ke dalam agenda iklim mereka dengan menyelaraskan tujuan nasional dan global terkait lahan gambut, sekaligus terus meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum di lapangan. Pada COP29, negara-negara di Asia Tenggara sebaiknya bekerja sama untuk menggali pendanaan dan sumber daya lainnya guna melestarikan, melindungi, dan memulihkan lahan gambut di kawasan tersebut.

Ulusan ini disusun dalam rangka Hibah Tematik Penelitian Ilmu Sosial Singapura (Singapore Social Science Research Thematic Grant (SSRTG) tentang “[Climate governance of nature-based Carbon Sinks in Southeast Asia](#)” (MOE2021-SSRTG-021) serta proyek Asia-Pacific Network for Global Change Research mengenai “[Policy and governance approaches to cooperative mitigation of peatland carbon emissions and transboundary haze in Southeast Asia](#)” (CRP2022-03MY-Muhamad Varkkey).

Helena Varkkey adalah Profesor Madya dalam bidang Politik dan Tata Kelola Lingkungan di Departemen Studi Internasional dan Strategis, Universiti Malaya.

Michelle Miller adalah Peneliti Senior di Asia Research Institute, National University of Singapore.

Matthew Ashfold adalah Profesor Madya di School of Environmental and Geographical Sciences, University of Nottingham Malaysia.